



PROFESIONALITAS PRAJURIT TNI AD DALAM MEWUJUDKAN KEUTUHAN BANGSA MELALUI PENGAMALAN PANCASILA

Oleh : Kolonel Kav Yusuf, S.Sos., M.M.

ABSTRAK

Dalam menciptakan profesionalitas prajurit yang dapat dihormati, disegani, dan dipercaya masyarakat dalam pengamalan Pancasila, terutama bagi TNI AD khususnya pada tingkat Kowil guna menjalankan tugas dan fungsinya. Keberadaan Koramil dan Babinsa di lingkungan masyarakat, dapat menutup dan mencegah adanya peluang berkembangnya organisasi yang menjadi bahaya laten bagi negara Indonesia. Dengan keberadaan Koramil dan Babinsa, kerjasama dengan komponen lainnya dalam pemantauan aktifitas masyarakat dapat berlangsung lebih baik dan dapat mencegah, paling tidak dapat menekan berkembangnya organisasi yang menentang kebijakan pemerintah. Peran Kowil sebagai sistem deteksi dini ditengah masyarakat selama ini dapat mencegah terjadinya berbagai ancaman dan gangguan terhadap keamanan nasional. Babinsa sebagai ujung tombak ditengah masyarakat, maka segala gerakan dan manuver yang membahayakan terhadap keutuhan NKRI dapat ditangkal dengan cepat melalui metode Binwalwil, Komsos dan Bakti TNI. Peran Kowil harus dilaksanakan untuk menciptakan profesionalitas prajurit yang dapat dihormati, disegani, dan dipercaya masyarakat dalam pengamalan Pancasila dalam hal ini dilaksanakan sesuai peran Binter.

Kata Kunci: Mewujudkan keutuhan bangsa melalui pengamalan Pancasila

ABSTRACT

In creating professionalism of soldier who can be respected, respected, and trusted by society in practice of Pancasila, especially for TNI AD especially at Kowil level to carry out their duties and functions. The existence of Koramil and Babinsa within the community, can close and prevent the existence of opportunities for the development of organizations that become a latent danger for the state of Indonesia. With the existence of Koramil and Babinsa, cooperation with other components in monitoring community activities can take place better and can prevent, at least to suppress the development of organizations that oppose government policies. Role of Kowil as early detection system in the middle of society so far can prevent the occurrence of various threats and disruption to national security. Babinsa as the spearhead in the society, all movements and maneuvers that endanger the integrity of NKRI can be denied quickly through Binwalwil, Komsos and Bakti TNI methods. The role of Kowil must be implemented to create professionalism of the soldier who can be respected, respected and trusted by the community in the practice of Pancasila in this case implemented according to the role of Binter

Keywords: To realize the integrity of the nation through the practice of Pancasila

Latar Belakang.

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan Undang-undang¹. UUD 1945 menyatakan, "Bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat"¹. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa wilayah NKRI yang sangat luas, dalam hal ini tidak hanya pada letak geografisnya, namun juga demografinya, dimana NKRI terdiri dari berbagai suku bangsa.

Luasnya wilayah NKRI baik secara geografis maupun demografis merupakan suatu kebanggaan bagi Rakyat Indonesia, namun disisi lain dikhawatirkan timbulnya konflik perpecahan, perselisihan, dan permusuhan antara suku bangsa satu dengan yang lain, antara wilayah satu dengan yang lain. Konflik merupakan suatu bentuk interaksi sosial ketika dua individu mempunyai kepentingan yang berbeda dan kehilangan keharmonisan di antara mereka. Pada dasarnya konflik merupakan hal yang alamiah dan sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Walter menyatakan "*the history of humankind and the rise and fall of civilization is unquestionably a story of conflict. Conflict is inherent in human activities. It is omnipresent and foreordained*"².

TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara sebagaimana termaktub dalam Tap MPR No. VII/2000

tentang Peran TNI dan UU No. 3/2002 tentang Pertahanan negara dan UU No. 34/2004 tentang TNI. Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 dengan jelas mengatur tugas pokok dan peran TNI dalam menjaga keutuhan bangsa, disisi lain dalam menjalankan tugasnya TNI harus memperhatikan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila sebagai landasan ideologi bangsa yang berketuhanan YME; kemanusiaan yang adil dan beradab; persatuan Indonesia; kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pada dasarnya ideologi Pancasila menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa demi terciptanya keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat, namun sayangnya bagi rakyat Indonesia akhir-akhir ini Pancasila tak ubahnya sebagai bacaan atau teks yang wajib dihafalkan bagi anak-anak di tingkat pendidikan dasar, sementara pengamalan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara cenderung menurun atau bahkan semakin hilang. Hal ini terbukti dengan mulai hilangnya pelajaran PMP (Pendidikan Moral Pancasila), dimana anak-anak dalam tingkat pendidikan hanya dikejar mengenai nilai akademis dan tidak dipedulikan moralitasnya, disisi lain adanya pihak yang menghendaki pergantian ideologi dan falsafah bangsa dengan menggantikan UUD dan Pancasila,

¹ UUD 1945 Pasal 33 (3)

² Lihat Maftuh Bunyamin, *Pendidikan Resolusi Konflik*, (Bandung: CV. Yasindo Multi Aspek, 2008), hlm. 1

sementara banyaknya kasus pelecehan³ terhadap Pancasila itu sendiri.

Meluasnya konflik, hilangnya moralitas, dan hal-hal lain yang mengancam keutuhan bangsa dalam hal ini menurut hemat penulis akar masalahnya adalah kurangnya atau bahkan melemahnya pengamalan Pancasila, oleh karena itu diperlukan kajian yang mendalam mengenai pengamalan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam hal ini TNI AD selain memiliki keprofesionalan sebagai prajurit, namun juga harus menjadi contoh atau tauladan bagi masyarakat dalam pengamalan Pancasila. Selain itu dengan pengamalan Pancasila yang baik, akan meningkatkan wibawa prajurit dan disegani masyarakat, disamping memiliki keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan profesionalitas lainnya.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji tentang implementasi Pancasila dalam *jurnal* yang berjudul "**Profesionalitas Prajurit TNI AD dalam Mewujudkan Keutuhan Bangsa Melalui Pengamalan Pancasila**".

2. Identifikasi Masalah. Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah yang terjadi sebagai berikut:

1. Luasnya wilayah NKRI mengidentifikasi luasnya konflik atau peristiwa yang mengancam keutuhan NKRI itu sendiri.
2. Konflik merupakan hal yang bersifat alami, semakin luas struktur sosial maka semakin luas konflik yang akan terjadi.
3. Melemahnya implementasi Pancasila sebagai ideologi bangsa.

4. Prajurit TNI AD harus menjadi contoh dalam pengamalan Pancasila.

5. Perlunya kajian dan konsep tentang implementasi Pancasila demi menjaga keutuhan bangsa.

3. Rumusan Masalah. Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka diperlukan pembatasan agar penelitian lebih fokus dan mendalam, oleh karena itu dalam penelitian ini diajukan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana konsep yang harus dilaksanakan untuk menciptakan profesionalitas prajurit yang dapat dihormati, disegani, dan dipercaya masyarakat dalam pengamalan Pancasila?
- b. Bagimana peran Kowil (Komando Wilayah) dalam pengamalan Pancasila guna meningkatkan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan prajurit?

4. Tujuan Penulisan. Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat diketahui bahwa tujuan penulisan sebagai berikut:

- a. Mendeskripsikan konsep yang harus dilaksanakan untuk menciptakan profesionalitas prajurit yang dapat dihormati, disegani, dan dipercaya masyarakat dalam pengamalan Pancasila.
- b. Menganalisa dan memaparkan peran Kowil (Komando Wilayah) dalam pengamalan Pancasila guna meningkatkan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan prajurit.

5. Manfaat Penulisan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi NKRI dan seluruh aspek kehidupan

³ Lihat kasus Zaskiya Gotik, Rizieq Shihab, HTI

berbangsa dan bernegara, terutama bagi TNI AD khususnya hal ini pada tingkat Kowil guna menjalankan tugas dan fungsinya saat mengimplementasikan Pancasila demi meningkatkan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan prajurit dalam menjaga keutuhan bangsa.

Pembasan

6. Konsep yang harus dilaksanakan untuk menciptakan Profesionalitas Prajurit yang dapat dihormati, disegani, dan dipercaya masyarakat dalam Pengamalan Pancasila

a. Fungsi Keberadaan Kowil.
Keberadaan kowil, merupakan hasil kajian dan menjadi pertimbangan atas pengalaman negara dalam menghadapi bahaaya dan ancaman, sehingga Kowil termasuk didalamnya Koramil dan Babinsa, telah diperankan semenjak awal kemerdekaan. Efektifitas Koramil dan Babinsa sudah terbukti, Koramil pada zaman perang kemerdekaan, telah menunjukkan kinerjanya yang secara efektif dapat mengajak masyarakat secara bersama-sama berjuang untuk melawan penjajah, dapat mengajak masyarakat untuk memberikan bantuan kepada para pejuang bangsa yang melakukan perlawaan kepada musuh demi rakyat agar terbebas dari penjajahan. Kowil pada waktu itu bahkan mengendalikan tugas pemerintahan sipil yang tidak operasional, sementara keberadaan pemerintah sangat dibutuhkan masyarakat⁴.

Keberadaan Koramil dan Babinsa di lingkungan masyarakat, dapat menutup dan mencegah adanya peluang berkembangnya organisasi yang menjadi *bahaya laten* bagi negara Indonesia. Pemantauan wilayah yang

longgar karena keterbatasan personel Kowil, akan memberi peluang bagi komunis untuk berkembang pesat, karena indikasi kemunculan mereka sudah terlihat, seperti kasus di Jawa Timur, perhimpunan anak-anak keturunan Komunis sudah berani secara terang-terangan melakukan rapat, bahkan mengundang anggota DPR, beruntung ormas pemuda yang menjadi bagian dan binaan komando kewilayahan membubarkan kegiatan tersebut. Dengan keberadaan Koramil dan Babinsa, kerjasama dengan komponen lainnya dalam pemantauan aktifitas masyarakat dapat berlangsung lebih baik dan dapat mencegah, paling tidak dapat menekan berkembangnya organisasi yang menentang kebijakan pemerintah.

Sehubungan dengan peran, tugas dan fungsi TNI maka diperlukan konsep dalam memaknai keberadaan dan pentingnya Komando Kewilayahan, sebagai berikut⁵:

- a) Keberadaan Kowil merupakan implementasi dan pencerminkan pengalaman negara dan kepentingannya bagi sistem pertahanan Negara
- b) Gelar komando kewilayahan saat disesuaikan dengan prediksi ancaman yang mungkin timbul, namun pembentukannya belum berjalan seiring dengan pembentukan Pemerintahan daerah, yang dirasakan menjadi beban berat bagi komando kewilayahan dan unsur-unsur pendukungnya.
- c) Untuk mendukung pelaksanaan OMP dan OMSP, kowil berkewajiban menyusun ADO, sebagai panduan bagi

⁴ Lihat Julius Pour, 2009, hlm.225-30

⁵ Lihat Juanda Sy, *Pentingnya Keberadaan Komando Kewilayahan Dalam Sistem Pertahanan Negara*, 2013.

satuan yang melaksanakan tugas diwilayah Kowil.

d) Keberadaan kowil yang tersebar disetiap wilayah seharusnya dapat menularkan budaya positif organisasi terhadap lingkungan kerjanya untuk membangun karakter bangsa dan dengan penerapan 8 wajib TNI secara konsisten, agar dapat meningkatkan kadar kemanunggalan TNI Rakyat.

e) Sebagai wakil pemerintah di daerah, Kowil bertanggungjawab dan berkewajiban menempatkan diri untuk mengawal pembangunan nasional didaerah.

7. Konsep dalam Pengamalan Pancasila guna meningkatkan Kemampuan, Pengetahuan dan Keterampilan Prajurit. Kowil TNI AD mulai dari Kodam, Korem, Kodim, dan Koramil sangat besar perannya dalam membantu pemerintah melaksanakan program pembangunan nasional. Melalui peran Kowil yang tersebar di wilayah Indonesia, proses pembangunan nasional yang membutuhkan stabilitas keamanan nasional dapat dipelihara oleh satuan Kowil⁶.

Peran Kowil sebagai sistem deteksi dini ditengah masyarakat selama ini dapat mencegah terjadinya berbagai ancaman dan gangguan terhadap keamanan nasional. Ancaman separatisme, terorisme dan radikalisme dapat diantisipasi oleh satuan Kowil, sehingga menunjang proses pembangunan nasional yang saat ini sedang giat-giatnya dicanangkan oleh pemerintah. Dengan Babinsa sebagai ujung tombak ditengah masyarakat, maka segala gerakan dan manuver yang membahayakan terhadap keutuhan NKRI dapat ditangkal dengan cepat melalui metode Binwalwil, Komsos dan Bakti TNI⁷.

Sebelum membahas tentang implementasi Pancasila, pada bab sebelumnya telah diutarakan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila, disisi lain TNI AD tidak hanya mengakui Pancasila sebagai Falsafah bangsa namun Pancasila termaktub dalam Sapta Marga sebagai berikut:

- Kami Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersendikan Pancasila.
- Kami Patriot Indonesia, pendukung serta pembela Ideologi Negara yang bertanggung jawab dan tidak mengenal menyerah.
- Kami Kesatria Indonesia, yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta membela kejujuran, kebenaran dan keadilan.
- Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, adalah Bhayangkari Negara dan Bangsa Indonesia.
- Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan Prajurit.
- Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, mengutamakan keperwiraan di dalam melaksanakan tugas, serta senantiasa siap sedia berbakti kepada Negara dan Bangsa.
- Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, setia dan menepati janji serta Sumpah Prajurit.

Sebagaimana tertuang dalam *Sapta Marga* tersebut bahwa TNI dalam hal ini sebagai Warga NKRI bersendikan Pancasila

⁶ Lihat majalah Palagan Volume 14 No. I Edisi Maret 2013, hlm. 7

⁷ Ibid

menunjukkan bahwa sebagai Prajurit TNI wajib menjunjung tinggi Nilai-nilai yang tertuang di dalam Pancasila. Disisi lain Sapta marga yang terdiri dari point 1 sampai dengan point ke-7 tersebut merupakan satu kebulatan yang tidak dapat dipisahkan, hal ini menunjukkan bahwa Pancasila tidak hanya dijadikan sebagai Falsafah Bangsa yang berlaku secara umum, namun Pancasila merupakan sendi-sendi kehidupan TNI, yang berarti bahwa Pancasila tertanam kuat dalam jiwa dan raga TNI sebagai Kesatria Indonesia yang berperan penting dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dari segala macam ancaman, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

Pembinaan teritorial yang dilaksanakan oleh aparat teritorial disetiap Komando Kewilayahan ditingkat Kodim secara umum telah berjalan sesuai dengan yang diprogramkan, namun dihadapkan kepada tuntutan untuk mampu mewujudkan stabilitas keamanan wilayah seiring dengan perkembangan situasi lingkungan strategis saat ini dan mengemukanya berbagai permasalahan konflik diberbagai wilayah nasional yang telah menjurus kepada disintegrasi bangsa, maka hasil pembinaan yang telah dilaksanakan belum mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan, indikasi yang terlihat adalah masih terjadinya beberapa konflik dalam masyarakat yang belum mampu diatasi secara tuntas oleh keberadaan aparat teritorial, hal ini merupakan salah satu indikator bahwa kurang profesionalnya aparat teritorial dan kurang tepatnya penerapan manajemen teritorial dihadapkan dengan sasaran pembinaan.

a. Sikap dan Perilaku Aparat Teritorial.

Pembinaan teritorial yang lahir ditengah-tengah perjuangan

bangsa bertujuan menciptakan semangat persatuan dan kesatuan khususnya antara TNI dengan Rakyat. Semangat inilah yang merupakan tuntutan terhadap aparat teritorial Kodim agar senantiasa memiliki sikap dan perilaku prajurit yang berdasarkan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI. Sikap dan perilaku yang tercermin dari para aparat teritorial saat ini pada umumnya sudah baik, namun demikian masih terdapat sikap dan perilaku aparat teritorial dilapangan yang tidak menunjukkan identitasnya sebagai prajurit rakyat, sehingga menimbulkan image negatif oleh masyarakat terhadap keberadaan TNI ditengah masyarakat.

b. Kemampuan Aparat Teritorial.

- **Kemampuan Deteksi dini, Lapor cepat dan Cegah dini.** Kemampuan deteksi dini, lapor cepat dan cegah dini yang seharusnya mutlak dimiliki secara optimal oleh setiap aparat teritorial yang berada diwilayah, dinilai masih jauh dari yang diharapkan, hal ini terlihat dari sering terjadaknya aparat teritorial dengan munculnya beberapa konflik yang terjadi tanpa mampu diantisipasi jauh sebelum terjadinya konflik, kondisi ini mengindikasikan bahwa para aparat teritorial belum memiliki kemampuan dalam mempelajari sumber dan anatomi konflik yang mungkin timbul diwilayah tanggungjawabnya.
- **Kemampuan penerapan Manajemen Teritorial.** Kemampuan penerapan manajemen teritorial oleh Kowil khususnya di tingkat Kodim dirasakan kurang berorientasi

tasi kepada tren perkembangan situasi yang terjadi, manajemen yang dilakukan oleh aparat teritorial saat ini masih berorientasi pada pembinaan rutin sesuai program, hal ini masih minimnya pemahaman unsur pimpinan terhadap manajemen konflik dan manajemen modern, akibatnya pembinaan teritorial yang dilakukan masih kurang mampu menjawab prioritas tantangan tugas yang harus di selesaikan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

- **Kemampuan Penguasaan Wilayah.** Kemampuan penguasaan wilayah sesuai dengan tanggung jawabnya mutlak bagi setiap aparat teritorial agar mampu mengklasifikasikan wilayah tanggung jawabnya tersebut sesuai dengan hakekat ancaman yang akan dan mungkin timbul, serta mampu mengidentifikasi penduduk diwilayahnya yang mungkin dicurigai dapat menjadi provokator dan belum mampu menguasai wilayah tanggung jawabnya secara utuh dan prospektif.
- **Kemampuan Pembinaan Perlawanan Rakyat.** Kemampuan penyiapan tenaga perlawanan rakyat untuk membantu TNI dalam meredam konflik yang terjadi di daerah, hingga saat ini belum terwujud secara optimal oleh para aparat teritorial yang berada diwilayah, kekuatan minimal tenaga rakyat terlatih yang harus disiapkan oleh Komando

Kewilayahan hampir tidak dapat terpenuhi, kondisi yang demikian mengindikasikan bahwa aparat teritorial belum mampu menguasai wilayah tanggung jawabnya secara utuh untuk melaksanakan pembinaan perlawanan rakyat. Sampai saat ini pembinaan perlawanan rakyat yang dilakukan aparat teritorial belum tersentuh, sebagai contoh aparat teritorial hanya menghadiri undangan pelatihan dari masing-masing sekolah ataupun organisasi, namun belum ada inisiatif dari aparat teritorial.

- **Kemampuan Komunikasi Sosial.** Unsur pokok dalam komunikasi sosial yang terjadi saat ini adalah aparat teritorial diwilayah khususnya Kodim, belum mampu menterjemahkan dan melakukan interaksi dalam berkomunikasi dengan masyarakat, yang berakibat banyaknya kebijakan-kebijakan yang tidak diterima dengan baik oleh masyarakat khususnya yang berkaitan dengan pertahanan negara, sehingga berakibat kepada langkah dan tindakan TNI tidak direspon positif oleh masyarakat.

- c. **Sarana dan prasarana.** Dalam mendukung pelaksanaan tugas dilapangan, kesiapan sarana dan prasarana memegang peranan penting dalam mewujudkan keberhasilan pelaksanaan tugas para aparat teritorial di lapangan. Kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki oleh satuan Komando Kewilayahan di tingkat Kodim khususnya piranti lunak,

sarana transportasi dan sarana komunikasi belum dapat memenuhi tuntutan tugas dilapangan, sehingga kecepatan dan ketepatan dalam menangani setiap permasalahan yang timbul tidak dapat diatasi dengan cepat dan tepat sasaran.

d. Penerapan metoda pembinaan teritorial. Penerapan metoda pembinaan teritorial yang di lakukan oleh para aparat teritorial diwilayah saat ini dinilai belum tepat dan terarah kepada tujuan dan sasaran yang di inginkan, hal ini diakibatkan oleh masih kurang optimalnya tingkat kemampuan aparat teritorial dalam menyikapi berbagai permasalahan yang timbul sebagai akibat dari perkembangan situasi serta perubahan hakekat ancaman yang dinamis, sehingga penerapan metoda yang dilakukan oleh aparat teritorial kurang berorientasi kepada kemungkinan perioritas sasaran pembinaan. Akibat dari pembinaan yang dilakukan kurang terarah pada sasaran yang diharapkan, maka upaya menciptakan stabilitas keamanan diwilayah tanggung jawabnya tidak dapat dilaksanakan secara optimal dan tidak berorientasi kepada kemungkinan hakekat ancaman. Disisi lain konflik sosial semakin berkembang, baik yang bernuansa budaya, adat, maupun agama dan lainnya lebih sulit dideteksi.

Berdasarkan uraian diatas, maka konsep yang harus dilaksanakan guna menciptakan profesionalitas prajurit yang dapat dihormati, disegani, dan dipercaya masyarakat dalam pengamalan Pancasila yakni dengan pengamalan Saptu Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI. Secara khusus beberapa hal yang perlu

dijadikan sasaran pembinaan utama dalam hal sikap dan perilaku aparat teritorial, kemampuan prajurit, sarana dan prasarana, serta penerapan metoda pembinaan teritorial.

8. Peran Kowil dalam Pengamalan Pancasila guna meningkatkan Kemampuan, Pengetahuan dan Keterampilan Prajurit. Peran Kowil yang harus dilaksanakan untuk menciptakan profesionalitas prajurit yang dapat dihormati, disegani, dan dipercaya masyarakat dalam pengamalan Pancasila dalam hal ini dilaksanakan sesuai peran binter berdasarkan Binwalwil, Komsos dan Bakti TNI sebagai berikut:

a. Pelaksanaan Binwawil (Pembinaan Ketahanan Wilayah) sebagai Pengamalan Pancasila. Binwanwil (Pembinaan Ketahanan Wilayah) adalah usaha dan kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, penggerahan dan pengendalian dalam rangka mewujudkan ketahanan yang dinamis di suatu wilayah, dengan meningkatkan kepekaan, kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menangkal setiap potensi ancaman terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah⁸.

Pembinaan Ketahanan Wilayah yang dilakukan oleh Kowil seyogyanya diarahkan pada pendidikan Pancasila, baik dalam bentuk teoritik maupun praktik atau implementasinya. Hal ini dapat dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:

- Pembinaan Pramuka. Peraturan Bersama Mendagri, Menhan, Mendiknas, Menag, Menpora dan Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka tentang pedoman tugas kepala daerah dalam pembinaan

gerakan pramuka guna meningkatkan kesadaran bela negara. Berdasarkan peraturan bersama tersebut mewajibkan kepala daerah dan instansi lainnya untuk membina gerakan pramuka dengan membentuk dan membina pramuka sebagai kekuatan embrio komponen pendukung pertahanan negara. Pembinaan pramuka oleh komando kewilayahan berdasarkan surat perintah Kasad, para Panglima, Komandan, Direktur dan Kepala Balakpus TNI AD untuk ikut menyemarakkan gerakan pramuka TNI AD dengan nama "Saka Kartika". Persoalannya adalah gerakan Pramuka di sekolah merupakan kegiatan ekstra kurikuler yang diselenggarakan oleh intern sekolah atau instansi tertentu yang lebih dahulu melakukan pembinaan. Hal ini dapat dilihat dari nama saka masing-masing gerakan pramuka antara lain Saka Bhayangkara, Saka Taruna Bumi, Saka Dirgantara, Saka Bahari dan saka-saka lainnya. Beberapa fakta di daerah, peran Kowil dalam kegiatan kepramukaan masih belum seragam, mungkin disebabkan oleh keterbatasan anggaran ataupun keahlian dalam penyelenggarannya. Selama ini peran Kowil baru terbatas menghadiri undangan kegiatan Pramuka yang diselenggarakan oleh sekolah-sekolah, atau terbatas sebagai pengawas. Seharusnya pembinaan pramuka yang bersifat permanen dan terus-menerus dapat dilaksanakan,

sehingga menjadi agenda besar bagi TNI AD untuk mengkaji lebih dalam terkait intensitas pembinaan pramuka di Indonesia oleh TNI AD.

- Sosialisasi dan pembentukan jaring teritorial dalam rangka meningkatkan kemampuan temu cepat dan lapor cepat terhadap perkembangan situasi di wilayah. Sosialisasi dalam hal ini ditekankan pada wawasan kebangsaan dan pentingnya persatuan dan kesatuan sesuai nilai-nilai Pancasila. Dalam hal ini sosialisasi dapat berbentuk *workshop*, pelatihan, seminar, ataupun kegiatan lainnya bersama rakyat, dengan mengadakan kegiatan bersama atau mengundang; tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh budaya, tokoh intelektual, serta berbagai lapisan masyarakat sesuai dengan litar agama, budaya, maupun intelektualnya. Diakui atau tidaknya tokoh dalam masyarakat sangat berperan dalam membantu menyelesaikan konflik dan sebaliknya juga rentan menjadi pemicu konflik.
- Meningkatkan kewaspadaan nasional seluruh prajurit dan masyarakat dalam rangka mencegah dan meminimalisir upaya bangkitnya kembali komunis serta paham radikal di Indonesia. Kewaspadaan nasional dalam hal ini tidak terbatas pada kewaspadaan pasca terjadinya konflik, atau melakukan pengawasan setelah adanya indikasi gerakan komunis, namun dilaksanakan secara kontinyu baik ada atau tidaknya upaya bangkitnya kembali komunis di wilayah masing-masing.

⁹ Lihat Juknik tentang Bintahwil, Nomor Skep / 481 / XII / 2004, tanggal 22 Desember 2004

Kewaspadaan dalam hal ini dilakukan bersama rakyat dengan melakukan hal-hal berikut:

- ✓ Selain memberikan materi tentang pentingnya persatuan dan kesatuan berdasarkan nilai Pancasila, namun materi yang diberikan diarahkan pada bahaya atau kerugian terhadap gerakan komunis dan gerakan lain yang memunculkan perpecahan.
- ✓ Babinsa dalam hal ini menyatu dan bersosialisasi bersama masyarakat sambil melakukan pengawasan terhadap ormas-ormas di sekitar wilayahnya.
- ✓ Kodam, Korem, Kodim, dan Koramil melakukan kunjungan terhadap tokoh-tokoh masyarakat baik yang berbasis agama, budaya, maupun basis lainnya, dengan tujuan mempererat komando rakyat.
- ✓ Masyarakat tidak hanya sebatas diberikan materi, namun diberikan pandangan untuk melaporkan jika ada pihak baik perseorangan maupun kelompok yang diindikasikan sebagai kebangkitan komunis atau gerakan lainnya yang mengancam keutuhan bangsa.
- ✓ Kewaspadaan dalam hal ini ditekankan juga kehati-hatian, yang berarti bahwa masyarakat maupun prajurit TNI sendiri tidak diperkenankan melakukan tindakan main hakim sendiri sebelum dilakukannya identifikasi dan pendalaman kasus.
- Inventarisasi Data Perlawan Wilayah untuk Kepentingan Pertahanan Negara. Inventarisasi dalam hal ini dapat disesuaikan dengan kondisi wilayah, dimana dapat dilakukan penambahan posko TNI misalnya didalam daerah yang rawan konflik. Namun hal yang lebih penting perlu ditekankan adalah, baik di Kodam, Korem, Kodim, dan Koramil perlu adanya desain ruang Pancasila, atau ruang khusus seperti perpustakaan atau museum Pancasila untuk diakses masyarakat umum.
- Asistensi penyiapan tata ruang kawasan pertahanan untuk kepentingan revisi/membuat tata ruang kawasan pertahanan.
- ✓ Klasifikasi daerah/wilayah sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Pertahanan (RUTR Wilhan) dihadapkan dengan kemungkinan datangnya ancaman meliputi daerah pertempuran, daerah komunikasi dan daerah belakang dalam rangka mendukung operasi militer.
- ✓ Komponen pertahanan negara, yaitu potensi pertahanan yang ada di wilayah yang dapat dilibatkan guna mendukung komponen utama dalam menghadapi ancaman meliputi komponen cadangan dan pendukung.
- ✓ Daerah pangkal perlawan, yaitu daerah yang disiapkan untuk menjadi tumpuan

dilancarkannya operasi perlawanan wilayah bila kekuatan musuh lebih kuat dan lebih besar.

b. Pelaksanaan Komsos (Komunikasi Sosial) sebagai Pengamalan Pancasila. Pelaksanaan Program Anggaran TNI AD bidang Teritorial sebagai acuan satuan komando kewilayahan untuk melaksanakan Komsos dengan kegiatan dan sasaran sebagai berikut⁹:

- Memelihara kemampuan komunikasi sosial prajurit TNI AD di satuan jajaran Kotamapus, Kotawil dan Balakpus TNI AD. Komunikasi sosial prajurit TNI AD di satuan jajaran Kotamapus, Kotawil dan Balakpus TNI AD dilaksanakan berlandaskan nilai-nilai Pancasila, dalam hal ini berarti bahwa komunikasi yang terjalin mengarah pada pemahaman prajurit TNI tentang Nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

- a) Melaksanakan kegiatan komunikasi sosial dengan aparat pemerintah agar terbangun pemahaman yang positif tentang Binter TNI AD dan terjalin kerjasama yang erat dalam pemberdayaan wilayah pertahanan di darat. Kegiatan komunikasi sosial antara TNI AD dengan aparat Pemerintah tidak terbatas pada laporan kondisi wilayah atau permintaan pemerintah atas bantuan TNI AD dalam menangani konflik di wilayah, namun komunikasi tersebut diarahkan sesuai nilai-nilai Pancasila dengan melakukan: **pertama**, kunjungan TNI AD

kepada Pemerintah Daerah, hal ini dilakukan baik secara perorangan maupun dalam tingkat kesatuan; **kedua**, mengadakan kegiatan antara TNI AD dengan Pemerintah baik dalam bentuk sosialisasi, workshop, Pelatihan/Diklat bersama masyarakat dan **ketiga**. materi secara teoritis maupun praktisnya kegiatan bersama tersebut memuat tentang wawasan kebangsaan terutama UUD 1945 dan Pancasila sebagai falsafah bangsa.

- b) Melaksanakan kegiatan komunikasi sosial dengan komponen masyarakat agar terbangun hubungan emosional yang positif antar prajurit dengan masyarakat, sehingga prajurit TNI AD mencintai dan dicintai rakyat serta terbangun kesadaran bela negara masyarakat. Kegiatan komunikasi sosial dengan komponen masyarakat dilakukan dengan sasaran utama tokoh masyarakat, baik tokoh agama, tokoh budaya, tokoh intelektual maupun tokoh lainnya. Sedangkan pada lapisan masyarakat umum tidak terbatas pada kegiatan forum masyarakat seperti workshop, Diklat, maupun kegiatan formal lainnya, namun prajurit TNI dalam hal ini Babinsa bersosialisasi langsung ke masyarakat diantaranya: **pertama**, menyelenggarakan kegiatan komunikasi sosial dengan keluarga besar TNI agar

⁹ Lihat Juknik tentang Komunikasi Sosial. Pusterad. 2006. Kegiatan dalam pertahanan negara, ketahanan wilayah dan mendukung program Bakti TNI

tetap terjalin hubungan emosional yang erat antara keluarga besar TNI dengan prajurit aktif; **kedua**, Menyelenggarakan kegiatan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan komunikasi sosial sebagai bahan penentuan kebijakan di bidang komunikasi sosial di masa mendatang dan **ketiga**, membuat Buku Pedoman Pemeliharaan Kemampuan komunikasi sosial untuk Prajurit.

3. Bakti TNI sebagai Pengamalan Pancasila. Kegiatan Bhakti TNI diarahkan dengan pendekatan kesejahteraan masyarakat, baik di bidang fisik materiil dan mental spiritual yang dilaksanakan atas permintaan Pemerintah Daerah/ Instansi terkait dan atau atas inisiatif sendiri dengan pola Operasi Bhakti dan Pekan Bhakti.

- **Operasi Bhakti.** Kegiatan Operasi Bhakti dilaksanakan dengan menyelenggarakan kegiatan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta ikut membantu pemerintah daerah dalam rangka akselerasi pembangunan di daerah terutama daerah yang terisolir, daerah miskin, daerah kumuh perkotaan, daerah perbatasan dan daerah yang rusak akibat bencana alam maupun akibat konflik horizontal sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan melalui:

- ✓ TMMD Reguler. Dilaksanakan setahun 2 kali, masing-masing terdiri dari 54 SSK setiap tahap dan meliputi seluruh wilayah Indonesia.
- ✓ TMMD Imbangsan. Dilaksanakan bersamaan dengan

pelaksanaan TMMD Reguler yang mana keseluruhan dana termasuk ULP prajurit didukung oleh Pemerintah Daerah.

- ✓ TMMD Skala Besar. Dibuka bersamaan dengan TMMD Reguler, sedangkan pelaksanaannya sesuai besar kecilnya sasaran yang harus diselesaikan. Kegiatan ini diprioritaskan pada sasaran yang memiliki nilai strategis.
- ✓ TMSS (TNI Manunggal Sosial Sejahtera). Dilaksanakan setahun 2 kali bersamaan dengan pelaksanaan TMMD, masing-masing tahap terdiri dari 4 SSK yang diatur oleh PJO (Penanggung Jawab Operasional TMMD) berdasarkan pertimbangan-pertimbangan.
- ✓ TMKK (TNI Manunggal Keluarga Berencana dan Kesehatan). Dilaksanakan setahun sekali, bekerja sama antara Kodim dengan BKKBN setempat.
- **Karya Bhakti.** Karya Bhakti merupakan bentuk Bhakti TNI yang diselenggarakan oleh satuan ataupun perorangan dalam menangani masalah yang bersifat fisik materiil dan mental spiritual yang diselenggarakan dalam bentuk:
 - ✓ Pekan Bhakti. Dilaksanakan pada minggu 1, 2 dan 3 dalam setiap bulannya, masing-masing 2 hari setiap minggu, satuan mengadakan interaksi dengan masyarakat

melalui berbagai kegiatan seperti keagamaan, olah raga, anjang sana, gelar seni budaya dan lain-lain.

- ✓ Karya Bhakti. Dilaksanakan oleh satuan atau prajurit dalam membantu mengatasi kesulitan rakyat di sekitarnya dalam lingkup terbatas sesuai dengan kemampuan yang ada.

▪ Sasaran.

- ✓ Bidang Fisik: Membantu program pemerintah dalam meningkatkan sarana dan prasarana kehidupan masyarakat; membantu program pemerintah dalam meningkatkan produktivitas lahan pertanian, membantu program pemerintah dalam mengatasi kemungkinan bencana alam, banjir dan kepunahan hutan; membantu program pemerintah dalam pengentasan kemiskinan; membantu program pemerintah dalam pengentasan buta aksara dan membantu program pemerintah dalam hal Keluarga Berencana.
- ✓ Bidang non Fisik: Mantapnya kesadaran berbangsa dan bernegara; Meningkatnya kesadaran bela negara dan cinta tanah air; Mantapnya wawasan kebangsaan; Meningkatnya pengetahuan masyarakat di bidang kesehatan; Meningkatnya kemampuan Hansip dan Wanra dan meningkatnya pengetahuan masyarakat di bidang pertanian masyarakat.

Peran Kowil dalam hal ini dari mulai dari Kodam, Korem, Kodim, dan Koramil

serta Babinsa sebagai pelaksana langsung yang terjun di masyarakat sesungguhnya merupakan bentuk pengimplementasian Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga dapat dikatakan bahwa binter yang dilaksanakan Kowil merupakan bentuk peran Kowil dalam peningkatan implementasi Pancasila guna menjaga keutuhan bangsa. Lebih lanjut hal ini menunjukkan bahwa TNI AD sudah memiliki konsep umum dalam berperan menjaga nilai-nilai Pancasila, yaitu melalui pelaksanaan binter oleh Kowil.

Secara umum konsep binter dapat diterapkan oleh Kowil diseluruh NKRI guna meningkatkan implementasi Pancasila, namun secara khusus terutama terkait teknisnya dikembalikan lagi pada masing-masing wilayah sesuai dengan kondisi di lapangan, mengingat luasnya wilayah NKRI baik secara geografis maupun demografis yang tentunya memiliki metode yang berbeda dan penerapan yang berbeda pula pada masing-masing wilayah.

Binwanwil (Pembinaan Ketahanan Wilayah) merupakan usaha dan kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, penggerahan dan pengendalian dalam rangka mewujudkan ketahanan yang dinamis di suatu wilayah, dengan meningkatkan kepekaan, kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menangkal setiap potensi ancaman terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah sesuai dengan Nilai-nilai Pancasila.

Kegiatan komunikasi sosial dilakukan dengan Pemerintah dan komponen masyarakat agar terbangun hubungan emosional yang positif antar prajurit dengan Pemerintah dan

masyarakat, sehingga prajurit TNI AD mencintai dan dicintai rakyat serta terbangun kesadaran bela negara masyarakat sesuai amanat UUD 1945 dan Nilai-nilai Pancasila sebagai falsafah bangsa.

Kegiatan Bhakti TNI diarahkan dengan pendekatan kesejahteraan masyarakat, baik di bidang fisik materiil dan mental spiritual yang dilaksanakan atas permintaan Pemerintah Daerah / Instansi terkait dan atau atas inisiatif sendiri. Hal ini merupakan implementasi Pancasila yaitu demi mewujudkan persatuan Indonesia dengan melakukan kegiatan bersama sebagai bukti Bhakti TNI terhadap bangsa dan negara.

Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, maka dapat dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Pertama. Konsep yang harus dilaksanakan guna menciptakan professionalitas prajurit yang dapat dihormati, disegani, dan dipercaya masyarakat dalam pengamalan Pancasila yakni dengan pengamalan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI. Secara khusus beberapa hal yang perlu dijadikan sasaran pembinaan utama dalam hal sikap dan perilaku aparat teritorial, kemampuan prajurit, sarana dan prasarana, serta penerapan metoda pembinaan teritorial. Kemampuan prajurit meliputi; kemampuan deteksi dini, lapor cepat dan cegah dini, kemampuan penerapan manajemen teritorial, kemampuan penguasaan wilayah, kemampuan pembinaan perlawanannya rakyat, dan komunikasi sosial. Sebagaimana tertuang dalam Sapta Marga tersebut bahwa TNI

dalam hal ini sebagai Warga NKRI bersendikan Pancasila menunjukkan bahwa sebagai Prajurit TNI wajib menjunjung tinggi Nilai-nilai yang tertuang di dalam Pancasila.

Kedua, Peran Kowil dalam pengamalan Pancasila guna meningkatkan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan prajurit dalam hal ini dilaksanakan sesuai peran binter berdasarkan Binwalwil, Komsos dan Bakti TNI. Binwanwil mewujudkan ketahanan yang dinamis di suatu wilayah, dengan meningkatkan kepekaan, kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menangkal setiap potensi ancaman. Komsos dilakukan dengan Pemerintah dan komponen masyarakat agar terbangun hubungan emosional yang positif antar prajurit dengan Pemerintah dan masyarakat, sehingga prajurit TNI AD mencintai dan dicintai rakyat serta terbangun kesadaran bela negara masyarakat sesuai amanat UUD 1945 dan Nilai-nilai Pancasila sebagai falsafah bangsa. Sementara Kegiatan Bhakti TNI diarahkan dengan pendekatan kesejahteraan masyarakat, baik di bidang fisik materiil dan mental spiritual yang dilaksanakan atas permintaan Pemerintah Daerah / Instansi terkait atau inisiatif sendiri.

Saran.

Pertama. Masing-masing Kowil perlu menyiapkan konsep pengamalan Pancasila terutama dalam peran peningkatan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan prajurit, mengingat kondisi geografis maupun demografis masing-masing wilayah yang berbeda.

Kedua. Perlunya kajian lebih mendalam terutama bintahwil, lebih khususnya lagi dalam Pembinaan Pramuka yang selama ini sebatas undangan dari masing-masing lembaga pendidikan, seyogyanya dalam hal ini dilakukan secara kontinyu sebagai bentuk pengamalan Pancasila.

Ketiga. Perlunya kajian mendalam tentang konsep Ruang Pancasila baik dalam bentuk museum maupun perpustakaan yang dapat diakses masyarakat umum perlu diwujudkan demi menguatkan kembali dan menanamkan Nilai-Nilai Pancasila dalam kehidupan.

DAFTAR PUSTAKA

Bakry, Noor Ms. 2010. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Bunyamin, Maftuh. 2008. *Pendidikan Resolusi Konflik*. Bandung: CV. Yasindo Multi Aspek.

Darmadi, Hamid. 2010. *Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: CV. Alfabeta.

Juanda Sy. Pentingnya Keberadaan Komando Kewilayah Dalam Sistem Pertahanan Negara, 2013.

Juknik tentang Bintahwil, Nomor Skep / 481 / XII / 2004, tanggal 22 Desember 2004

Juknik tentang Komunikasi Sosial. 2006. *Kegiatan dalam Pertahanan Negara, Ketahanan Wilayah dan mendukung Program Bakti TNI*. Jakarta: Pusterad.

Majalah Palagan Volume 14 No. I Edisi Maret 2013, hlm. 7

Pour, Julius. 2010. *Jernih Melihat Cermat Mencatat: Antologi Karya Jurnalistik Wartawan Senior Kompas*. Jakarta: Kompas.

BIODATA PENULIS



Kolonel Kav Yusuf, S.Sos., M.M., lahir Bandung pada tanggal 18 Juni 1965. Pendidikan Umum: S2 tahun 2013, Dikmil: Akmil 1989; Seskoad 2004; jabatan yang pernah dijabat; Danden Intel Dam V/Brw (2003), Danden Intel Dam III/Slw (2004), Danyonkav-4/Tank Dam III/Slw (2005), Dandim 0607 SMI Rem 061/SK (2008), Kabagpam dan Lat Set Pusterad (2010), Pabandyajianbang Juangdoktrinorg Seskoad (2011), Dosen Muda Seskoad (2011), Dosen Madya Seskoad (2013), Patun Seskoad (2014), Kabitopsdik Sdirbindik Seskoad (2015), Dosen Utama Seskoad (2015 s.d sekarang)